

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sub sektor peternakan merupakan sub sektor strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan, disamping juga sebagai mata pencaharian sebagian besar masyarakat pedesaan. Pemerintah selalu berupaya meluncurkan berbagai bentuk program untuk memajukan sektor peternakan. Kondisi saat ini hasil pemanfaatan dari berbagai bentuk program pemerintah tidaklah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan usaha peternakan. Terbukti usaha peternakan tetap saja sebagai usaha sampingan bagi masyarakat, sistem pemeliharaan sebagian besar masih secara sederhana, adopsi inovasi dan teknologi oleh peternak masih lambat, sedikit dan belum berkualitas. Peternak/kelompok akan menjual ternak yang dipeliharanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Jumlah ternak yang dipelihara setiap kelompok peternak tidak bertambah bahkan semakin berkurang, misalnya di Indonesia jumlah sapi pada tahun 2013 di Indonesia berjumlah 13.127.923 ekor, sedangkan pada sensus tahun 2023, jumlah populasi ternak sapi sebanyak 11.318.085 ekor, atau terjadi penurunan populasi sapi sebanyak 14% dalam sepuluh tahun terakhir (BPS RI, 2023).

Usaha peternakan khususnya sapi potong sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Sebagaimana yang dikatakan Pramono (2021) kendala yang paling umum dialami peternak adalah keterbatasan modal. Keterbatasan modal yang dimiliki membuat peternak harus menggunakan sistem ternak yang membutuhkan modal kecil, yaitu tradisional. Berangkat dari terbatasnya modal bagi peternak, serta usaha peternakan sapi tidak menarik kalangan pelaku usaha karena dianggap

kurang menguntungkan dan memerlukan waktu lama, maka diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) unit usaha peternakan adalah fasilitas pembiayaan dari pemerintah yang bekerja sama dengan perbankan untuk mendukung usaha peternakan. KUR unit usaha peternakan merupakan skema kredit yang diberikan kepada peternak individu, kelompok usaha, atau badan usaha yang bergerak di bidang peternakan. Program ini menyediakan modal kerja dan investasi dengan bunga yang rendah, yaitu sekitar 6% per tahun, dan dirancang untuk membantu peternak yang tidak memiliki agunan tambahan atau yang belum dianggap bankable oleh lembaga keuangan (Aulia, 2023).

Proses pengajuan KUR sering kali dianggap rumit dan memerlukan dokumen yang lengkap. Banyak peternak tidak mengetahui prosedur yang diperlukan untuk mengajukan kredit, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran dana. Bank harus menunggu hingga semua berkas lengkap sebelum proses kredit dapat dilanjutkan. Kemudian, sering kali jumlah dana yang disetujui untuk KUR tidak sesuai dengan kebutuhan usaha peternak. Misalnya, jika peternak mengajukan pinjaman sebesar Rp25 juta, mereka mungkin hanya mendapatkan Rp10 juta atau kurang, yang tidak mencukupi untuk pengembangan usaha mereka (Veronica dkk., 2022). Dengan mengetahui kendala yang dihadapi peternak dalam melaksanakan program KUR serta berapa pendapatannya, kita dapat mengevaluasi apakah program ini benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan peternak. Program yang berhasil akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup peternak, serta mengurangi ketergantungan mereka pada sumber pembiayaan informal seperti rentenir.

Target Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor peternakan di Sumatera Barat pada tahun 2024 adalah bagian dari pagu total KUR yang disiapkan oleh Bank Nagari, yaitu Rp. 2 triliun. Dari total tersebut, pemerintah mendorong penyaluran KUR ke sektor produksi, termasuk peternakan, agar mencapai minimal 60% dari total alokasi KUR yang disetujui (Kusnadi, 2024). Sejalan dengan itu, Sumatera Barat mempunyai peluang dalam mendukung program swasembada daging sapi. Hal ini didukung dengan potensi jumlah populasi sapi potong di Sumatera Barat yang berada pada urutan ke-9 populasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah 424.631 ekor (Fadhillah dkk, 2023). Menurut Madarisa et al (2017) Provinsi Sumatera Barat sudah mampu untuk memenuhi permintaan daging sapi di provinsi bagian tengah seperti Bengkulu, Jambi, Riau, dan Kepri. Sehingga dengan potensi tersebut, Sumatera Barat memiliki peluang untuk menjadi salah satu daerah penghasil daging yang ada di Pulau Sumatera. Dengan adanya KUR, diharapkan populasi ternak sapi di Sumatera Barat dapat meningkat, kematian sapi dapat ditekan, pemotongan sapi meningkat, dan populasi sapi bertambah, sehingga swasembada daging dapat tercapai. Kabupaten di Sumatera Barat yang banyak menerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor peternakan meliputi Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Dharmasraya, dan Pasaman. Dimana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penerima dana KUR peternakan terbanyak adalah pada unit ternak sapi (Setiawan, 2023).

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp50 miliar untuk mendukung usaha sekitar 2.000 petani dan peternak. Dengan asumsi masing-masing petani dan peternak dapat mengakses antara Rp25 juta hingga Rp30 juta, ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk

meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan di daerah Pesisir Selatan (Setiawan, 2023). Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor peternakan di Pesisir Selatan mulai diperkenalkan pada tahun 2017. Pada tahun tersebut, realisasi KUR untuk peternakan mencapai Rp14,6 miliar. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan telah disalurkan di beberapa kecamatan seperti Basa Ampak, Basa Tapan, Lunang, Air Pura, Pancang Soal, Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang, dan Sutera. Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan salah satu sentra pengembangan ternak sapi lokal (Didi, 2019).

Penyaluran KUR di Kecamatan Linggo Sari Baganti sudah ada sejak tahun 2017 (Didi, 2019). Sebagai salah satu sentra pengembangan sapi potong di Pesisir Selatan, Kecamatan Linggo Sari Baganti memiliki basis peternak yang sudah terbiasa memelihara sapi dengan sistem semi intensif, sehingga KUR di wilayah ini dapat lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas usaha peternakan. Pada tahun 2022 terdapat 11 orang peternak yang mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang tergabung kedalam satu kelompok Tani Ternak yaitu Kelompok Tuo Sepakat. Penyaluran dana kredit tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah, Bank Nagari serta peternak yang menjadi debitur. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui berapa pendapatan yang diperoleh peternak sapi potong penerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan bagaimana kemampuan peternak penerima dana Kredit Usaha Rakyat dalam memenuhi kewajiban pengembalian kreditnya. Sehingga peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Peternak Sapi Potong Penerima Dana Kredit

Usaha Rakyat (KUR) Di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa pendapatan yang diperoleh peternak sapi potong penerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana kemampuan peternak sapi potong penerima dana Kredit Usaha Rakyat dalam memenuhi kewajiban pengembalian kreditnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapatan yang diperoleh peternak sapi potong penerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menganalisis kemampuan peternak sapi potong penerima dana Kredit Usaha Rakyat dalam memenuhi kewajiban pengembalian kreditnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang diperoleh nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi ilmiah yang dapat digunakan oleh pihak terkait untuk;

1. Sebagai sumber informasi bagi pelajar untuk menambah pengetahuan maupun menjadikan karya tulis ini sebagai bahan review.

2. Sebagai masukan bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran KUR khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Meningkatkan kesadaran di kalangan stakeholder terkait (pemerintah, bank, dan peternak) mengenai pentingnya penyaluran KUR yang efektif dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha peternakan.
4. Sebagai sumber data dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan program KUR atau sektor peternakan.

